



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5801-5807

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendidikan: Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di Tengah Kebijakan Penghematan APBN

Adil Siswanto, Nurfina Latifa, Afrilia Putri Hardiana, Laura Kusuma Wardani

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

adilsiswanto@uinkhas.ac.id, nvina885@gmail.com, afriiaputrihardiana57@gmail.com, laurakusuma5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam menghadapi kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mempertahankan kualitas layanan pendidikan. Efisiensi pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program-program pendidikan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan di daerah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran, serta telaah dokumentasi yang mencakup dokumen perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan dalam situasi penghematan anggaran yang diberlakukan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal, penentuan prioritas program, kapasitas manajerial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Efisiensi dapat diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan anggaran dan penyesuaian prioritas kegiatan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, yaitu keterbatasan anggaran, penundaan pelaksanaan program tertentu, serta tuntutan penyesuaian terhadap kebijakan penghematan APBN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penghematan APBN tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang responsif, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan akuntabilitas, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas pengelolaan anggaran.

Kata kunci: Efisiensi, Anggaran Pendidikan, Penghematan APBN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. Oleh sebab itu, diperlukan proses serta hasil pendidikan yang bermutu tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai pihak seperti pemerintah, pengelola pendidikan, dan para pemangku kepentingan perlu menjalin kerja sama. Upaya kolektif tersebut harus dikoordinasikan secara baik agar peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud secara optimal. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebagai bentuk komitmen dalam menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Agar distribusi sumber daya dapat dilakukan secara efektif dalam mencapai tujuan tersebut, sistem pendidikan perlu mengutamakan pengelolaan keuangan yang efisien, terutama karena adanya tuntutan yang semakin tinggi terhadap peningkatan hasil (Galigao, no date). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di sekolah tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program pendidikan. Sekolah dasar sebagai unit paling

mendasar dalam sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana pendidikan dimanfaatkan secara efektif dan efisien(Sdn and Selatan, 2025).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, baik pada tingkat makro (negara) maupun mikro (lembaga), aspek yang sangat krusial adalah pembiayaan, karena merupakan unsur yang mutlak harus tersedia. Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan amanat undang-undang, setiap tahunnya telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)(Mahmudah *et al.*, 2020). Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai kondisi di mana tidak terdapat lagi peluang untuk mengalokasikan ulang sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan kebijakan efisiensi anggaran menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, khususnya dalam sektor pendidikan(Pendidikan and Jakarta, 2020). Akuntabilitas perlu diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan guna mendukung pelaksanaan kegiatan, mengingat biaya merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh. Setiap kegiatan yang menghasilkan output berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan dana yang memadai. Demikian pula dalam bidang pendidikan, yang sebagai bentuk investasi sangat bergantung pada ketersediaan pembiayaan(Safiltri *et al.*, no date).

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai serta pengelolaan yang dilakukan secara efektif. Aspek keuangan dan pembiayaan menjadi faktor krusial yang tidak terpisahkan dalam administrasi dan pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan efisien guna mencapai tujuan, baik pada lembaga yang bersifat profit maupun non-profit(Tahsinia *et al.*, 2025). Model pembiayaan yang diterapkan saat ini perlu dievaluasi dan disempurnakan agar mampu mengakomodasi beragam kebutuhan peserta didik serta menjamin keberlanjutan program pendidikan inklusi(Nafarin *et al.*, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan pendidikan, serta dirumuskan solusi yang efektif untuk mengatasi disparitas yang terjadi(Indonesia, Indri and Harahap, 2024). Analisis efisiensi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi pemborosan, ketidaktepatan alokasi, serta hambatan dalam implementasi program pendidikan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi fiskal yang terbatas, sekaligus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember.

Pembiayaan dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas di satuan pendidikan. Menurut Bray (1996) pembiayaan pendidikan berkaitan dengan sumber-sumber dana yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, serta alokasi pengeluaran untuk proses pembelajaran. Hal tersebut mencakup berbagai kebutuhan sekolah, seperti pembayaran gaji, penyediaan sarana dan prasarana, serta berbagai jenis layanan di setiap jenjang pendidikan(Keislaman, 2022). Menurut Opan Arifudin, komponen keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu indikator penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Selain itu, komponen tersebut juga berperan sebagai faktor produksi yang menentukan terselenggaranya proses belajar mengajar secara optimal di lembaga pendidikan(Barat, no date).

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan sektor publik. Konsep efisiensi menggambarkan kemampuan suatu instansi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal. Dalam konteks pengelolaan anggaran pendidikan, efisiensi tidak hanya diukur dari aspek penghematan biaya, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Konsep efisiensi dalam sektor publik memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *value for money* yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran. Penerapan prinsip tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya secara optimal, meminimalkan pemborosan, serta menyalurkan anggaran secara tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.(Rahmayati, no date)

Pengelolaan anggaran pendidikan merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan sektor publik yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan dana pendidikan dilakukan secara efektif dan efisien. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran, sehingga mampu menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat transparansi, serta kemampuan manajerial yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menuntut adanya penerapan tata kelola yang baik agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. (Huda, Hidayat and Chandrawati, 2023) Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, keterbukaan dalam pelaksanaan, serta keberadaan sistem pengawasan yang memadai. Pengelolaan yang terarah dan terkontrol dengan baik akan mendorong peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus mengurangi potensi terjadinya penyimpangan. (Hisyam, 2025). Efisiensi dalam anggaran pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan organisasi dalam mendistribusikan sumber daya secara tepat dan sesuai kebutuhan. Pengelolaan anggaran yang kurang efektif berpotensi menurunkan kualitas hasil pendidikan serta menghambat pencapaian program yang telah direncanakan. (Marwiyah *et al.*, 2024)

Kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menjaga kestabilan fiskal, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi serta keterbatasan sumber daya. Kebijakan ini diwujudkan melalui pengendalian terhadap belanja yang kurang prioritas, peningkatan efisiensi program, serta penyesuaian alokasi anggaran agar lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam perspektif keuangan publik, kebijakan efisiensi anggaran dipandang sebagai respons terhadap kondisi defisit fiskal, meningkatnya beban utang, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penerapan kebijakan ini mendorong pemerintah untuk lebih selektif dalam menetapkan prioritas belanja serta mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efisien. (Martarech, Budiyanto and Iriani, 2025)

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah dengan jumlah satuan pendidikan yang relatif besar menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Keragaman kebutuhan pendidikan yang kompleks, serta adanya tekanan kebijakan efisiensi anggaran, menuntut strategi pengelolaan yang tepat agar pemanfaatan anggaran tetap optimal dan sesuai sasaran. Pengelolaan anggaran yang efektif tidak hanya terbatas pada pembagian dana, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, penyusunan anggaran, serta pelaporan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. (Journal, Utami and Makassar, 2024). Dalam konteks Kabupaten Jember, tantangan pengelolaan anggaran pendidikan menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif dan merata. Keterbatasan sumber daya keuangan yang dihadapkan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya optimalisasi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan guna mengetahui sejauh mana anggaran yang tersedia mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif.

Melalui artikel ini, penulis bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di tengah kebijakan penghematan APBN. Dengan mempertimbangkan aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban keuangan, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, analisis ini juga diarahkan untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran serta strategi yang diterapkan untuk mengatasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat daerah, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pendidikan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut (Fadli, 2021) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data pada kondisi alamiah. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau perhitungan statistik. Yang dimana agar memahami secara mendalam bagaimana efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, terutama dalam konteks kebijakan penghematan APBN. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. (Adlini *et al.*, 2024) menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses, strategi, dan dinamika yang terjadi pada suatu organisasi atau Lembaga sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih detail dan kontekstual. Sejalan dengan pendapat tersebut, (*et al.*, 2021) menyatakan bahwa studi kasus merupakan pendekatan yang efektif untuk memahami fenomena secara menyeluruh karena mampu mengungkap hubungan antara berbagai factor yang memengaruhi suatu peristiwa dalam kondisi nyata. Oleh karena itu, pendekatan studi kasus ini dinilai sesuai

untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, terutama dalam hal menghadapi kebijakan penghematan APBN yang berdampak pada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi anggaran Pendidikan.

Objek penelitian ini adalah karyawan dan bendahara di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang bekerja dalam bidang perencanaan dan evaluasi karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran pendidikan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dan juga observasi, yang dimana yaitu:

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses dan pengalaman yang terjadi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang detail mengenai mekanisme penyusunan anggaran, penentuan program prioritas, pelaksanaan anggaran, serta proses evaluasi dan pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman informan terkait penerapan kebijakan penghematan APBN, dampaknya terhadap program pendidikan, serta strategi yang dilakukan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga data yang berkaitan dengan alasan, pertimbangan, dan kebijakan yang mendasari setiap keputusan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi dan aktivitas yang berlangsung di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Tujuan observasi adalah untuk mengamati bagaimana proses pengelolaan anggaran dilaksanakan dalam praktik, mulai dari kegiatan perencanaan, koordinasi antarbidang, pelaksanaan program, hingga proses monitoring dan evaluasi. Observasi juga bertujuan untuk memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara sehingga peneliti dapat membandingkan antara informasi yang disampaikan oleh informan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Selain itu, melalui observasi peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efisiensi pengelolaan anggaran, seperti pola kerja, pemanfaatan teknologi digital, sistem administrasi, serta koordinasi antarpegawai dalam pelaksanaan program pendidikan. Dengan demikian, penggunaan wawancara dan observasi secara bersamaan memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam, akurat, dan komprehensif sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi pengelolaan anggaran pendidikan secara lebih objektif dan sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendidikan di tengah kebijakan penghematan APBN tetap berupaya dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip prioritas, akuntabilitas, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang sehingga kebutuhan setiap program dapat diidentifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Prioritas anggaran difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan layanan pendidikan, seperti Dana BOS, beasiswa pendidikan, insentif guru PAUD, serta pembayaran gaji ASN dan PPPK. Temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berupaya mempertahankan kualitas layanan pendidikan melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Tahsinia, dkk 2025) yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selain itu, (Mahmudah, dkk 2020) menjelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab karena anggaran pendidikan adalah alat utama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dengan begitu, penentuan program yang jadi prioritas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah cara untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang fokus pada keberlanjutan layanan pendidikan.

Penerapan kebijakan penghematan APBN berdampak pada struktur dan pelaksanaan anggaran pendidikan. Beberapa pos anggaran seperti biaya perjalanan dinas, pemeliharaan, alat tulis kantor, biaya percetakan, konsumsi

saat rapat, dan bahan bakar mengalami pengurangan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi. Bahkan beberapa program yang dianggap tidak terlalu penting, seperti program perizinan dan pengembangan bahasa serta sastra, mengalami pengurangan atau bahkan dihentikan sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi mendorong organisasi di sektor publik untuk menyesuaikan program yang mereka jalankan agar penggunaan anggaran lebih terarah pada kebutuhan yang dianggap mendesak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martarech, Budiyanto, dan Iriani 2025) yang menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan pemerintah untuk mengatur ulang prioritas pengeluaran agar dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada. Walaupun ada beberapa perubahan pada anggaran, tingkat pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember masih di atas 90 persen, dan hampir semua target kinerja berhasil dicapai mendekati 100 persen. Tingginya pencapaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya fokus pada penggunaan dana, tetapi juga bertujuan untuk mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan penerapan konsep efisiensi di sektor publik, yang menekankan pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan hasil yang terbaik dengan sumber daya yang ada. Efisiensi di sektor publik tidak hanya dilihat dari pengurangan biaya, tetapi juga dari sejauh mana organisasi dapat memberikan manfaat yang maksimal dengan menggunakan anggaran secara efektif. Karena itu, keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam mencapai target kinerjanya menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang mereka terapkan masih bisa membantu mencapai tujuan organisasi.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa *prinsip value for money* diterapkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Prinsip ini terlihat dalam usaha Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini terutama melalui program insentif untuk guru PAUD, bantuan untuk guru swasta yang belum memiliki sertifikasi, dan berbagai bantuan pendidikan lainnya. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang baik perlu memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara bersamaan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Jadi, keberhasilan dalam mengelola anggaran tidak hanya dilihat dari seberapa banyak uang yang dipakai, tetapi juga dari pengaruh yang ditimbulkan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital adalah salah satu cara penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung sekarang dipindahkan ke platform online seperti *Zoom Meeting* dan *Google Meet*. Langkah ini bisa menurunkan biaya perjalanan dinas, pengeluaran untuk rapat, dan berbagai biaya operasional lainnya tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pemanfaatan teknologi digital menunjukkan bahwa organisasi dapat beradaptasi menghadapi batasan anggaran. Temuan ini mendukung pendapat Huda, Hidayat, dan Chandrawati (2023) yang mengatakan bahwa untuk mengelola anggaran dengan baik, dibutuhkan inovasi dan kemampuan manajerial yang baik, sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal.

Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghematan APBN masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaan pendidikan. Pengurangan anggaran di sektor pemeliharaan dan rehabilitasi membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memperbaiki fasilitas dan prasarana pendidikan. Walaupun sebagian kebutuhan bisa dipenuhi lewat program revitalisasi sekolah yang dibiayai oleh APBN, keadaan ini tetap menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bisa berdampak pada kualitas fasilitas pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Marwiyah et al. 2024) yang menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak baik bisa berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan dan menghalangi pencapaian program yang sudah direncanakan.

Selain fasilitas dan infrastruktur, tantangan lain yang dihadapi adalah kesejahteraan para guru honorer. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa tenaga honorer masih mendapatkan gaji yang cukup rendah jika dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Keadaan ini bisa membuat motivasi kerja menurun dan juga berdampak pada kualitas layanan pendidikan di setiap sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya bergantung pada seberapa efisien dana digunakan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang menjalankan layanan pendidikan. Karena itu, peningkatan kesejahteraan para pendidik harus menjadi fokus dalam kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan di masa depan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah berhasil menggunakan berbagai cara untuk menjaga efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan meskipun ada kebijakan penghematan dari APBN. Ini dilakukan dengan mengubah prioritas program, menggunakan teknologi digital, dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja. Dinas Pendidikan terus berupaya memberikan layanan

pendidikan yang terbaik meskipun ada beberapa hambatan, terutama terkait kesejahteraan tenaga pendidik dan pengurangan beberapa program pendidikan (Ilmiah and Pendidikan, 2024). Keterlibatan semua bidang dalam merencanakan, menentukan program yang menjadi prioritas, menerapkan prinsip nilai untuk uang, menggunakan teknologi digital, serta memperkuat pemantauan dan evaluasi adalah faktor utama yang membantu mencapai efisiensi tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, ketepatan dalam mengalokasikan sumber daya, adanya sistem pengawasan yang baik, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan fiskal. Namun, masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, terutama mengenai kesejahteraan guru dan penyediaan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih fleksibel dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah berupaya menerapkan pengelolaan anggaran Pendidikan secara efektif dan efisien di Tengah kondisi kebijakan penghematan APBN. Hal tersebut terlihat dari proses perencanaan anggaran yang melibatkan seluruh bidang, sehingga kebutuhan program dapat diidentifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Selain itu, anggaran juga difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan Pendidikan, seperti Dana BOS, pembayaran gaji ASN dan PPPK, insentif guru PAUD, serta berbagai bantuan Pendidikan lainnya. Penerapan kebijakan penghematan APBN mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos anggaran dan program yang dianggap kurang prioritas. Meskipun demikian, tingkat realisasi anggaran tetap berada di atas 90 persen dan sebagian besar target kinerja berhasil dicapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi, melainkan mendorong penggunaan anggaran yang lebih selektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip value for money dan pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Penggunaan platform digital dalam pelaksanaan rapat dan koordinasi mampu mengurangi berbagai biaya operasional tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Temuan ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kemampuan manajerial, sistem pengawasan yang baik, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan fiskal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana Pendidikan serta rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik honorer. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan dalam jangka panjang apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan agar tujuan pembangunan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diharapkan dapat terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat analisis kebutuhan, menentukan prioritas program dengan tepat, dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal dalam berbagai kegiatan operasional. Di samping itu, sistem pemantauan dan penilaian harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran berlangsung dengan cara yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah harus lebih fokus untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik honorer dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, supaya kualitas layanan pendidikan tetap terjaga meskipun anggaran terbatas. Untuk peneliti berikutnya, disarankan agar memperluas area penelitian dengan melibatkan lembaga atau daerah lain. Hal ini bisa memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang seberapa efektif dan efisien pengelolaan anggaran pendidikan dalam berbagai situasi kebijakan fiskal.

Referensi

1. Adlini, M.N. *et al.* (2024) "Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif:Kajian Konsep, Desain, dan Manfaatnya," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan Tambusao*, 8(1), pp. 974–980.
2. Barat, P.J. (no date) *No Title*.
3. Fadli, M.R. (2021) "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), pp. 33–54. Available at: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
4. Galigao, R.P. (no date) "Budgeting and Resource Allocation: Strategies for Effective Financial Management in Education," 2(6), pp. 975–984. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15716449>.
5. Hisyam, M. (2025) "Dampak Efisiensi Anggaran Pendidikan : Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan dan Kualitas Outputnya," 2(1), pp. 21–27.
6. Huda, M.N., Hidayat, R. and Chandrawati, T. (2023) "Financial Management of Educational Operational Assistance in Improving the Quality of Education in Sesayap District , Tana Tidung Regency," 13(1), pp. 63–74.
7. Ilmiah, J. and Pendidikan, W. (2024) "No Title," 10(9), pp. 462–469.
8. Indonesia, P. Di, Indri, N. and Harahap, Y. (2024) "Problematika Manajemen Pembiayaan," 2(2), pp. 133–149.
9. Journal, A.M., Utami, S. and Makassar, N. (2024) "Analisis Strategi Efektif Pengelolaan Anggaran Guna Peningkatan Kualitas Operasional Pendidikan SMKN 1 Pinrang," 2(2), pp. 121–125.
10. Keislaman, J. (2022) "S l a m i k a," 4, pp. 504–515.
11. Mahmudah, S. *et al.* (2020) "Strategi pendidikan dasar untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan pendidikan."
12. Martarech, M.I., Budiyanto, M.N. and Iriani, A. (2025) "Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025," 09(02), pp. 360–372.
13. Marwiyah, S. *et al.* (2024) "Pengukuran Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendidikan Measuring the Effectiveness of Education Budget Utilisation," 4(3), pp. 1618–1624.
14. Nafarin, W. *et al.* (2025) "Strategi Pengembangan Model Pembiayaan Pendidikan Inklusi : Solusi Dukungan Finansial Berkelanjutan," 5(2), pp. 717–729.
15. Pendidikan, L. and Jakarta, D.I. (2020) "Pengaruh kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas layanan pendidikan di jakarta pusat."
16. Rahmayati, A. (no date) *No Title*.
17. Safiltri, D.A. *et al.* (no date) "Analisis kebijakan pendidikan terkait akuntabilitas pembiayaan pendidikan."
18. Sdn, D.I. and Selatan, B. (2025) "Ahmad Fajar Shidiq, Jumiati Ulfah, Yanti Restiawati, Widyamike Gede Mulawarman: Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pendidikan Di SDN 006 Bontang Selatan," 7(5), pp. 1554–1569. Available at: <https://doi.org/10.56489/fik.v4i2>.
19. Tahsinia, J. *et al.* (2025) "Efisiensi biaya dalam pendidikan tinggi untuk menjaga kualitas di tengah keterbatasan anggaran," 6(1), pp. 135–149.
20. *et al.* (2021) "Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif," *Mediapsi*, 7(2), pp. 119–129. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>.